

Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi di Indonesia

Abd Hamid¹

¹ STEI Masyarakat Madani Pamekasan, Indonesia; abdhamid_12@yahoo.co.id

IDAROTUNA: Jurnal
Administrative Science

Vol 5 No 2 November 2024
<https://doi.org/10.54471/idarotuna.v5i2.107>

Received: October 28, 2024
Accepted: October 31, 2024
Published: November 06, 2024

Publisher's Note: Program Study Office Administrative stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract : The purpose of this study is to examine how Indonesian economic policy incorporates Pancasila values. Pancasila, the state's fundamental ideology, serves as a framework for the development of governmental policies, including those pertaining to the economy. It is anticipated that Pancasila values—such as economic sovereignty, shared prosperity, and social justice—will serve as the foundation for the development of people-supporting policies. However, in reality, neoliberal economic policies, globalization, and international market forces frequently pose obstacles to the adoption of Pancasila ideals. This study examines Indonesia's economic policies at the national and regional levels using qualitative methods and a descriptive-analytical approach. It also assesses how well Pancasila values have been incorporated. The fourth and fifth Pancasila principles are reflected in this study's explanation of the government's responsibility in formulating policies based on people's economic circumstances. The study's findings indicate that while a number of economic measures, including initiatives to reduce poverty and promote equitable economic growth, have attempted to apply Pancasila values, there is a disconnect between the ideals of Pancasila and their practical application. Therefore, in order to strike a balance between economic growth and equitable social welfare distribution, more work is required to improve the integration of Pancasila ideals and economic policies.

Keywords: *Pancasila, economic policy, social justice, people's economy, Indonesia.*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan dasar ideologi Pancasila yang berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah sejalan dengan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kelima yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Sila ini menuntut adanya sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Dalam praktiknya, ekonomi Indonesia sering kali dihadapkan pada tantangan ketimpangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, serta dominasi ekonomi oleh kelompok tertentu. Padahal, berdasarkan landasan filosofi Pancasila, negara diharapkan mampu mewujudkan sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat, melalui kebijakan yang adil, tidak memihak, dan merata (Suryahadi, A., Hadiwidjaja, G., & Sumarto, S, 2012).

Berbagai kebijakan ekonomi telah diluncurkan pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga program pengentasan kemiskinan, seperti Dana Desa, pengembangan koperasi, hingga program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini bertujuan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial dan ekonomi kerakyatan, dalam realitas ekonomi Indonesia (Sukarno, D., & Saputra, A, 2020).

Namun, meskipun telah ada sejumlah kemajuan, ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah mendasar yang belum sepenuhnya terselesaikan. Beberapa wilayah masih tertinggal dalam pembangunan, dan kesejahteraan ekonomi belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan ekonomi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya (Tambunan, T, 2020).

Penelitian ini berfokus pada implementasi Pancasila dalam kebijakan ekonomi di Indonesia, dengan tujuan mengeksplorasi sejauh mana kebijakan ekonomi pemerintah telah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fokus penelitian meliputi: 1. Analisis kebijakan ekonomi kerakyatan yang diterapkan oleh pemerintah, seperti pengembangan koperasi, UMKM, serta

program Dana Desa, dan sejauh mana kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan sosial. 2. Kendala dan tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi, termasuk hambatan politik, birokrasi, dan keterbatasan sumber daya.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi di Indonesia menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," dalam kebijakan ekonomi nasional. Metode penelitian terbaru yang relevan dengan topik ini akan menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang lebih valid dan relevan dalam konteks terkini.

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi secara lebih mendalam dan kontekstual. Studi ini berfokus pada kebijakan-kebijakan ekonomi nasional, seperti Dana Desa, Kredit Usaha Rakyat (KUR), program pengembangan UMKM, dan kebijakan distribusi pembangunan, dalam kaitannya dengan nilai keadilan sosial (Suryadi, A, 2020). Penelitian dilakukan di beberapa lokasi yang menjadi fokus program kebijakan ekonomi berlandaskan Pancasila, seperti Jawa Timur sebagai daerah dengan implementasi program Dana Desa dan pengembangan UMKM yang cukup maju.

Penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, serta memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan tentang perbaikan program-program ekonomi yang telah berjalan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif sesuai dengan cita-cita Pancasila (Hatta, R, 2018).

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang sejauh mana kebijakan ekonomi Indonesia telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ekonomi yang lebih berkeadilan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian mengenai Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi di Indonesia mengungkapkan beberapa temuan penting terkait sejauh mana nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, diterapkan dalam kebijakan ekonomi nasional. Temuan ini mencakup analisis kebijakan yang sudah berjalan, evaluasi dampaknya terhadap masyarakat, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

1. Implementasi Nilai Keadilan Sosial dalam Kebijakan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," telah tercermin dalam berbagai kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Sila ini mengandung esensi bahwa negara harus menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali, dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Prinsip keadilan sosial yang melekat dalam sila kelima menuntut adanya kebijakan yang mampu menciptakan akses yang setara bagi setiap warga negara untuk mendapatkan sumber daya, kesejahteraan, dan peluang ekonomi.

Beberapa kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah telah berupaya untuk mencerminkan prinsip keadilan sosial ini, baik melalui peningkatan pembangunan daerah, pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, maupun penyediaan akses permodalan bagi kelompok yang lebih rentan secara ekonomi (Tambunan, T, 2020). Berikut adalah beberapa kebijakan yang menggambarkan implementasi sila kelima Pancasila:

a. Program Dana Desa

Program Dana Desa merupakan salah satu kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Melalui Dana Desa, pemerintah memberikan alokasi dana yang cukup signifikan kepada desa-desa di seluruh Indonesia untuk pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan layanan publik.

Program ini berlandaskan pada semangat keadilan sosial, di mana desa-desa yang sebelumnya tertinggal dan minim akses terhadap fasilitas dasar kini mendapatkan

kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, serta irigasi untuk pertanian telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Sebagai contoh, pembangunan jalan desa tidak hanya mempercepat mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka akses pasar bagi produk pertanian lokal, sehingga petani dapat meningkatkan pendapatan mereka (Ariyanto, H, 2019).

Melalui Dana Desa, pemerintah berupaya mewujudkan keadilan sosial dengan memastikan bahwa seluruh masyarakat, terutama yang berada di wilayah pedesaan dan terpinggirkan, dapat menikmati hasil pembangunan secara lebih merata. Ini merupakan refleksi dari semangat Pancasila untuk menciptakan kesetaraan dalam kesempatan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

b. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dirancang untuk membantu kelompok ekonomi kecil, seperti pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mendapatkan akses permodalan yang lebih mudah dengan bunga rendah. KUR berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan ekonomi rakyat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi produktif.

Melalui KUR, pemerintah berusaha mengurangi hambatan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dalam memperoleh akses pinjaman yang selama ini didominasi oleh pelaku ekonomi besar. Sebelum adanya KUR, pelaku usaha kecil sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses modal dari bank konvensional karena keterbatasan jaminan dan risiko tinggi yang dianggap melekat pada usaha kecil. Namun, dengan KUR, akses permodalan lebih terbuka, sehingga pelaku usaha kecil dapat memperluas bisnis mereka dan menciptakan lapangan kerja baru di komunitas lokal.

Implementasi KUR mencerminkan keadilan sosial dalam konteks ekonomi karena memberikan akses yang lebih setara kepada pelaku ekonomi kecil untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi nasional. Dengan demikian, KUR menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan pengurangan ketimpangan antara kelompok ekonomi besar dan kecil.

c. Pengembangan UMKM dan Koperasi

UMKM dan koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi rakyat di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang berfokus pada pengembangan UMKM dan koperasi merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial. Pembangunan ekonomi berbasis rakyat ini mencerminkan prinsip gotong royong yang menjadi salah satu nilai dasar Pancasila, di mana kesejahteraan bersama diutamakan di atas kepentingan individu.

Kebijakan pemberdayaan UMKM dan koperasi tidak hanya terbatas pada akses permodalan melalui KUR, tetapi juga melalui penyediaan pelatihan, peningkatan kapasitas, serta bantuan teknologi dan akses pasar. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai instansi, baik pusat maupun daerah, untuk membantu UMKM memperluas jangkauan produk mereka ke pasar yang lebih luas, termasuk akses ke pasar global.

Keberadaan koperasi sebagai bentuk usaha kolektif juga mencerminkan nilai keadilan sosial, karena koperasi beroperasi berdasarkan prinsip kebersamaan, partisipasi, dan demokrasi ekonomi. Melalui pengembangan UMKM dan koperasi, pemerintah berusaha menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

d. Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan keterampilan masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau yang terdampak pandemi COVID-19. Program ini menyediakan pelatihan dan insentif ekonomi bagi mereka yang mencari pekerjaan atau ingin memulai usaha baru. Dengan Kartu Prakerja, masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam akses pendidikan dan pelatihan dapat memperoleh keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Kartu Prakerja mencerminkan upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan secara ekonomi, agar dapat berpartisipasi dalam perekonomian nasional. Dengan

memperluas akses pelatihan kerja, program ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, yang pada akhirnya mendukung prinsip keadilan sosial.

e. Kebijakan Redistribusi Aset

Kebijakan redistribusi aset, seperti reforma agraria dan sertifikasi tanah, juga merupakan bagian dari implementasi sila kelima Pancasila. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan dan memperbaiki akses masyarakat kecil terhadap sumber daya agraria. Pemerintah berupaya mendistribusikan lahan yang sebelumnya dikuasai oleh segelintir pihak kepada masyarakat miskin atau kelompok tani yang membutuhkan.

Dengan redistribusi aset, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap lahan pertanian dapat memperoleh hak atas tanah yang dapat mereka kelola untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kebijakan ini merupakan bentuk konkret dari upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial, terutama di sektor agraria yang menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat pedesaan.

2. Dampak Kebijakan terhadap Pemerataan Ekonomi

Penelitian ini menemukan bahwa dampak kebijakan pemerintah dalam upaya pemerataan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ternyata masih bervariasi. Perbedaan hasil implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi geografis, infrastruktur, akses terhadap sumber daya, dan dinamika sosial ekonomi di daerah tertentu. Hal ini membuat penerapan kebijakan ekonomi yang adil belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia dan di antara kelompok masyarakat yang berbeda.

a. Variasi Berdasarkan Wilayah Geografis

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki perbedaan geografis yang signifikan antarwilayah, yang turut memengaruhi efektivitas kebijakan pemerataan ekonomi. Beberapa wilayah, terutama di bagian barat Indonesia seperti Jawa, Sumatra, dan sebagian Kalimantan, umumnya memiliki infrastruktur yang lebih baik dan akses yang lebih mudah terhadap pasar, pendidikan, dan layanan publik. Sebaliknya, wilayah-wilayah di bagian

timur Indonesia, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku, masih menghadapi keterbatasan infrastruktur yang memadai, akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi, serta tingkat pembangunan yang lebih rendah.

Kebijakan ekonomi yang berbasis Pancasila seperti Dana Desa dan program redistribusi aset mungkin dapat lebih mudah dijalankan di daerah-daerah dengan infrastruktur yang baik. Di daerah-daerah seperti Jawa dan Sumatra, alokasi Dana Desa misalnya, dapat lebih cepat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur pedesaan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang segera berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, di daerah-daerah terpencil seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, keterbatasan infrastruktur dasar menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Pembangunan fasilitas di daerah-daerah ini sering kali memerlukan biaya yang lebih besar dan waktu yang lebih lama, sehingga hasil yang dicapai tidak secepat di wilayah lain.

Selain itu, keterbatasan akses transportasi di wilayah-wilayah terpencil juga memperlambat distribusi bantuan ekonomi, seperti bantuan KUR (Kredit Usaha Rakyat) atau bantuan sosial. Kesulitan distribusi ini memperburuk ketimpangan karena masyarakat di daerah terpencil tidak mendapatkan manfaat secara merata seperti masyarakat di wilayah yang lebih maju secara infrastruktur. Distribusi KUR di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur sering kali terkendala oleh akses ke lembaga keuangan formal, sehingga pelaku usaha kecil di daerah ini lebih sulit mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha mereka.

b. Perbedaan Berdasarkan Kelompok Masyarakat

Selain berdasarkan wilayah, dampak kebijakan ekonomi juga bervariasi di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang sudah memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi cenderung lebih mudah memanfaatkan kebijakan ekonomi pemerintah, sementara kelompok masyarakat yang rentan, seperti masyarakat miskin, masyarakat adat, dan masyarakat di daerah pedalaman, sering kali kesulitan mengakses manfaat kebijakan tersebut.

Sebagai contoh, program redistribusi aset, yang bertujuan untuk memberikan akses tanah kepada kelompok masyarakat yang tidak memiliki lahan, masih menghadapi

tantangan di lapangan. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan reforma agraria, masyarakat adat atau kelompok tani di daerah terpencil sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit atau konflik kepemilikan lahan dengan perusahaan besar. Masyarakat adat di Papua atau Kalimantan, misalnya, sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan sertifikat tanah karena adanya perbedaan antara hukum adat dan hukum negara, serta adanya kepentingan korporasi yang kuat di daerah mereka. Hal ini menyebabkan manfaat kebijakan redistribusi aset belum dirasakan secara merata oleh kelompok masyarakat ini.

Di sisi lain, kelompok masyarakat yang memiliki akses lebih baik ke lembaga pendidikan dan layanan publik cenderung lebih mudah mengambil keuntungan dari program Kartu Prakerja atau program pelatihan kerja lainnya yang diluncurkan pemerintah. Masyarakat di perkotaan yang lebih dekat dengan pusat informasi dan teknologi, misalnya, lebih cepat mendapatkan manfaat dari program ini dibandingkan masyarakat di pedesaan yang keterbatasan akses internet dan teknologi.

c. Kesenjangan dalam Akses Permodalan dan Kesempatan Ekonomi

Kebijakan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertujuan untuk membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan memberikan akses permodalan yang lebih mudah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap modal ini masih belum merata di seluruh wilayah dan kelompok masyarakat. UMKM di daerah perkotaan, yang memiliki akses lebih dekat ke bank dan lembaga keuangan, dapat dengan mudah mengakses KUR dan memanfaatkannya untuk mengembangkan usaha mereka. Sebaliknya, UMKM di daerah pedesaan atau terpencil sering kali kesulitan mendapatkan pinjaman karena kurangnya akses ke perbankan atau informasi tentang program tersebut.

Selain itu, faktor lain seperti tingkat pendidikan dan literasi keuangan juga mempengaruhi variasi dampak kebijakan ekonomi berbasis Pancasila. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih mudah memahami prosedur dan persyaratan dalam mendapatkan manfaat dari program pemerintah, seperti pengajuan pinjaman KUR atau program pelatihan kerja. Sebaliknya, masyarakat dengan literasi keuangan yang rendah sering kali mengalami kesulitan dalam memahami cara mengakses

manfaat kebijakan tersebut, yang pada akhirnya membatasi partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi yang lebih produktif.

d. Dampak Ketimpangan Regional

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa dampak kebijakan pemerataan ekonomi berbasis Pancasila turut dipengaruhi oleh ketimpangan regional. Ketimpangan ini bukan hanya soal geografis, tetapi juga terkait dengan sektor ekonomi yang mendominasi di masing-masing wilayah. Wilayah yang kaya sumber daya alam, seperti Sumatra dan Kalimantan, lebih cepat mendapatkan manfaat dari kebijakan ekonomi karena adanya potensi sumber daya yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sebaliknya, wilayah yang kurang kaya sumber daya, seperti Nusa Tenggara dan Papua, menghadapi tantangan lebih besar dalam mengembangkan ekonomi lokal, meskipun kebijakan pemerintah telah digulirkan.

Kebijakan redistribusi aset dan reforma agraria, misalnya, mungkin lebih mudah diterapkan di wilayah yang memiliki tanah yang luas dan subur, seperti di Sumatra atau Jawa. Namun, di wilayah seperti Nusa Tenggara atau Papua, yang menghadapi tantangan geografis dan konflik kepemilikan lahan, redistribusi tanah sering kali terhambat oleh kendala sosial, budaya, dan legal.

e. Hambatan dalam Implementasi dan Monitoring

Penelitian juga menyoroti bahwa dampak kebijakan terhadap pemerataan ekonomi berbasis Pancasila sangat dipengaruhi oleh efektivitas implementasi dan monitoring dari kebijakan tersebut. Di beberapa daerah, kebijakan yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan justru tidak berjalan efektif karena lemahnya pengawasan dan monitoring di tingkat lokal. Hal ini sering kali disebabkan oleh birokrasi yang lambat, kurangnya transparansi, serta adanya korupsi dan penyelewengan dana di tingkat daerah.

Sebagai contoh, Dana Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, di beberapa tempat tidak berjalan efektif karena kurangnya monitoring dari pemerintah pusat. Banyak desa yang belum memanfaatkan dana tersebut secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya karena adanya penyalahgunaan dana oleh

oknum pemerintah desa. Ketidakefisienan dalam pengelolaan Dana Desa ini menyebabkan manfaat yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat desa menjadi terbatas, yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan di tingkat lokal.

3. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Ekonomi Berbasis Pancasila

Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan yang menghalangi implementasi efektif nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi di Indonesia. Meskipun prinsip-prinsip keadilan sosial dan pemerataan yang terkandung dalam sila kelima Pancasila telah dijadikan dasar berbagai kebijakan ekonomi, kenyataannya penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Hambatan-hambatan ini bisa bersifat struktural, birokratis, maupun sosiokultural, yang secara keseluruhan memengaruhi efektivitas kebijakan dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan.

Berikut adalah beberapa hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini:

a. Ketimpangan Infrastruktur Antarwilayah

Salah satu hambatan utama dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi adalah ketimpangan infrastruktur antarwilayah di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam, mulai dari wilayah perkotaan yang maju hingga daerah terpencil yang masih tertinggal, menyebabkan kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur. Akses yang tidak merata terhadap infrastruktur seperti jalan, transportasi, listrik, dan teknologi informasi menjadi penghalang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi yang seharusnya memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat.

Sebagai contoh, Dana Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di tingkat desa, sering kali tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal di daerah-daerah terpencil seperti Papua, Maluku, atau Nusa Tenggara Timur karena minimnya akses infrastruktur. Desa-desa di wilayah ini sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses pasar, layanan kesehatan, pendidikan, dan teknologi, yang membuat dana tersebut tidak berdampak signifikan pada peningkatan ekonomi lokal. Dengan keterbatasan infrastruktur, banyak daerah terpencil kesulitan dalam memanfaatkan kebijakan ekonomi yang telah dirancang untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan.

b. Birokrasi yang Rumit dan Korupsi

Hambatan berikutnya yang diidentifikasi adalah masalah birokrasi yang rumit dan sering kali berbelit-belit, yang memperlambat implementasi kebijakan ekonomi berbasis nilai-nilai Pancasila. Kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kecil atau pedesaan, seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau redistribusi aset, sering kali tersendat oleh proses birokrasi yang lambat dan tidak efisien. Masyarakat, terutama di daerah terpencil, kerap menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi yang rumit untuk mengakses manfaat kebijakan tersebut.

Selain itu, praktik korupsi di tingkat pemerintahan, terutama di tingkat daerah, menjadi hambatan serius bagi pelaksanaan kebijakan ekonomi yang berbasis pada prinsip keadilan sosial. Korupsi dan penyelewengan dana, seperti yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa, dapat mengurangi efektivitas kebijakan yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sering kali diselewengkan atau tidak digunakan sesuai peruntukan, sehingga dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa di beberapa daerah, birokrasi yang tidak efisien dan korupsi telah menghambat tujuan kebijakan ekonomi untuk menciptakan keadilan sosial, sebagaimana dicita-citakan oleh Pancasila.

c. Kesenjangan Akses terhadap Sumber Daya Ekonomi

Hambatan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kesenjangan akses terhadap sumber daya ekonomi, yang masih menjadi masalah signifikan bagi masyarakat di daerah tertinggal dan kelompok masyarakat ekonomi rendah. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk memberikan akses permodalan dan aset kepada masyarakat kecil, seperti program KUR dan reforma agraria, pelaksanaannya di lapangan masih belum optimal.

Kebijakan seperti redistribusi tanah dalam program reforma agraria, misalnya, sering kali terhambat oleh masalah kepemilikan lahan yang timpang tindih, konflik agraria,

serta rendahnya akses masyarakat adat dan kelompok miskin terhadap informasi dan bantuan hukum. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan sertifikat tanah atau menghadapi masalah dalam memperoleh hak atas lahan karena proses administrasi yang rumit dan minimnya bantuan hukum.

Masyarakat adat di Papua, Kalimantan, dan Sumatra, misalnya, sering kali menghadapi kesulitan dalam mengamankan hak atas tanah mereka, terutama ketika berhadapan dengan perusahaan besar yang memiliki kepentingan ekonomi di wilayah tersebut.

Selain itu, akses terhadap sumber daya keuangan juga masih terbatas di kalangan masyarakat miskin atau yang tinggal di daerah terpencil. Akses ke lembaga keuangan formal, seperti bank, masih rendah di banyak daerah pedesaan, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Akibatnya, masyarakat di daerah ini sulit mendapatkan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha. Hambatan ini menegaskan bahwa kesenjangan akses terhadap sumber daya ekonomi masih menjadi kendala utama dalam mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

d. Literasi Ekonomi dan Pendidikan yang Rendah

Rendahnya literasi ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ekonomi yang berbasis Pancasila. Meskipun berbagai program ekonomi telah diluncurkan oleh pemerintah, banyak masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan atau terpencil, yang tidak sepenuhnya memahami cara mengakses program-program tersebut atau memanfaatkannya secara optimal. Literasi keuangan yang rendah menyebabkan masyarakat kesulitan memahami mekanisme seperti pengajuan kredit atau pengelolaan keuangan untuk usaha kecil.

Program pelatihan kerja seperti Kartu Prakerja, yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, cenderung lebih efektif di daerah perkotaan dengan akses teknologi dan pendidikan yang lebih baik. Sebaliknya, di daerah pedesaan atau terpencil, keterbatasan akses internet, fasilitas pelatihan, dan rendahnya tingkat pendidikan membuat masyarakat sulit memanfaatkan program ini dengan baik. Akibatnya, kebijakan ini lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat di kota atau yang

sudah memiliki akses teknologi, sementara kelompok masyarakat yang lebih rentan atau kurang teredukasi justru tertinggal.

e. **Dinamika Sosial dan Budaya**

Hambatan lain yang ditemukan adalah dinamika sosial dan budaya yang berbeda-beda di setiap daerah. Beberapa kebijakan ekonomi yang berbasis Pancasila mungkin lebih sulit diterapkan di daerah yang memiliki struktur sosial dan budaya yang kompleks. Masyarakat adat atau masyarakat di daerah pedalaman, misalnya, memiliki cara hidup dan nilai-nilai yang berbeda, sehingga kebijakan ekonomi modern sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan atau nilai-nilai lokal mereka.

Sebagai contoh, program redistribusi tanah dalam reforma agraria mungkin lebih sulit diterapkan di daerah dengan masyarakat adat yang memiliki konsep kepemilikan lahan berdasarkan hukum adat, bukan hukum negara. Konflik kepentingan antara masyarakat adat dan pihak pemerintah atau korporasi sering kali menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah. Hal ini menyebabkan kebijakan ekonomi yang dirancang untuk menciptakan keadilan sosial justru menimbulkan ketegangan sosial dan memperburuk konflik agraria di beberapa daerah.

f. **Keterbatasan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan**

Hambatan lainnya adalah kurangnya monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap kebijakan ekonomi yang berbasis Pancasila. Meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik di tingkat pusat, sering kali implementasinya di daerah tidak diawasi secara ketat. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan hasil yang dicapai di lapangan. Keterbatasan monitoring ini juga membuat masalah seperti korupsi, penyelewengan dana, dan ketidakefisienan birokrasi tidak tertangani dengan baik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak kebijakan ekonomi yang gagal mencapai dampak optimal karena lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi di tingkat lokal. Dana Desa, misalnya, sering kali tidak digunakan sesuai peruntukan karena minimnya pengawasan dari pemerintah pusat. Ketidakteraturan dalam pelaporan dan evaluasi

hasil kebijakan membuat penyimpangan tidak segera terdeteksi dan diperbaiki, yang pada akhirnya menghambat realisasi keadilan sosial yang dicita-citakan oleh Pancasila.

4. Pembahasan: Tantangan dan Prospek Implementasi Ekonomi Pancasila

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Pancasila dijadikan dasar dalam kebijakan ekonomi, realisasinya belum sepenuhnya optimal. Beberapa kebijakan sudah berada di jalur yang benar dalam mencerminkan keadilan sosial, seperti Dana Desa dan KUR, tetapi masih ada tantangan besar dalam aspek pelaksanaannya.

Pemerintah perlu memperkuat tata kelola yang baik (*good governance*), mengurangi praktik korupsi, serta meningkatkan kapasitas birokrasi untuk mendukung implementasi kebijakan ekonomi yang lebih efektif. Selain itu, perlu adanya fokus pada peningkatan infrastruktur di daerah-daerah terpencil dan terbelakang agar hasil kebijakan dapat lebih merata dan adil bagi seluruh masyarakat.

Sebagai prospek ke depan, pemerintah perlu memperluas akses pendidikan ekonomi dan pelatihan keterampilan kepada masyarakat di daerah tertinggal, serta menciptakan ekosistem usaha yang mendukung pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan ekonomi agar nilai-nilai Pancasila lebih terintegrasi dalam proses kebijakan.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Pancasila dalam kebijakan ekonomi di Indonesia telah menunjukkan beberapa keberhasilan dalam hal pengurangan kesenjangan dan peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi. Namun, tantangan birokrasi, korupsi, dan ketimpangan wilayah masih menjadi hambatan utama. Diperlukan perbaikan tata kelola dan kebijakan yang lebih inklusif untuk mencapai cita-cita Pancasila, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Referensi

- Suryahadi, A., Hadiwidjaja, G., & Sumarto, S. (2012). Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia before and after the Asian Financial Crisis. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 48(2), 209-227
- Sukarno, D., & Saputra, A. (2020). Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 11(2), 230-245.
- Tambunan, T. (2020). Inequality and Poverty in Indonesia: Current Trends and Policy Responses. *Journal of Southeast Asian Economies*, 37(2), 202-222.
- Suryadi, A. (2020). Pengembangan UMKM Berbasis Nilai Pancasila: Kajian Deskriptif Kualitatif. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Nasional*, 25(2), 12-25.
- Hatta, R. (2018). Ekonomi Pancasila dan Implementasinya dalam Kebijakan Publik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 75-89.
- Tambunan, T. (2020). UMKM dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 45(3), 211-227.
- Ariyanto, H. (2019). Dampak Infrastruktur Terhadap Perekonomian Desa: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 12(4), 89-106.